

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Sabaruddin. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abidin, Said Zainal, 2008, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*, Jakarta: Suara Bebas.

- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agus Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Agus Dwiyanto et all, 2006. *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM
- Anggun Tri Mulyani. 2016. *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran*. (Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002)
- Bambang Waluyo. 1996 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar Grafika
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Hafifah SJ Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Ibrahim Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya..* Bandung: Mandar Maju.
- Inu Kencana Syafii. 2013. *Ilmu Pemerintahan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen
- Padmo Wahyono. 1984. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rahardjo Adisasmita, 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Riyadi Soeprapto. 2004. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*, Jakarta: Habibie Center,
- Robinson Tarigan. 2005. *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sinambela, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi. cetakan ketiga*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rosyada, dkk. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah 5.
- Soerjono Soekanto & sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press
- Suto Eko, 2008, *Makalah "Mengkaji Ulang Good Governance"*, Yogyakarta, IRE
- Sutopo, Adi Suryanto. 2003. *Pelayanan Prima, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar
- Z Surjadi, 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: sinar Grafika.

Zudan Arif Fakrulloh, 2010, *Kode Etik Penyelenggara Negara Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004, Tentang Jalan. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2005, Tentang Jalan Tol. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 71 Tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 pasal 4 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik. Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Sekretariat Negara, Jakarta.

C. Lain-lain

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), diakses melalui <http://www.sipedia.com/2014/03/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5-dan-pembahasannya.html>, pada 20 Maret 2017

Kementrian PPN / Bappenas 2017

(<http://kpsrb.bappenas.go.id/ppptoolkit/tentang-kpbu/>) diakses pada 2017

Pengertian terminologi “sejahtera” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring www.kbbi.web.id terakhir diakses pada 19 Mei 2016.

Mughnifar, Ilham, 2019. Pengertian Infrastruktur adalah : menurut Ahli dan Undang-Undang (<https://materibelajar.co.id/pengertian-infrastruktur/>), diakses pada 21 Oktober 2019

<http://indonesiaindonesia.com/f/12699-mencermati-jalan-tol-trans-jawa/>, diakses pada 20 Maret 2017

Databoks, 2017. Bagaimana Progres Pembangunan Infrastruktur di Indonesia? (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/09/bagaimana-progres-pembangunan-infrastruktur>), diakses pada 9 Juni 2017

Muchlisin, Riadi. 2019. Asas, Prinsip, Standar dan Jenis Pelayanan Publik (<https://www.kajianpustaka.com/2019/10/asas-prinsip-standar-dan-jenis-pelayanan-publik.html>)

Meuthia Ganie-Rochman, 2000, dalam artikel berjudul “Good governance :Prinsip,Komponen dan Penerapannya”, Jakarta: yang dimuat dalam buku HAM :Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM

<https://stiebanten.blogspot.com/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html>

<https://yessimiliyan05.wordpress.com/ekonomi-publik/fungsi-pemerintah/>

<https://fdokumen.com/document/public-private-partnership-55f9e688a8c60.html>